

**PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
MAKASSAR**

SAFITRI HANDAYANI

Nomor Stambuk : 10561 04679 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SAFITRI HANDAYANI

Nomor Stambuk : 10561 04679 13

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan
Pemerintahan Daerah di Kota Makassar

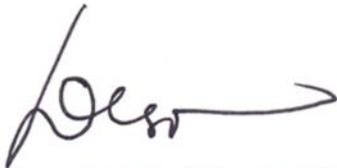
Nama Mahasiswa : Safitri Handayani

Nomor Stambuk : 105610467913

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

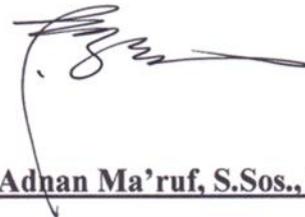
Menyetujui :

Pembimbing I



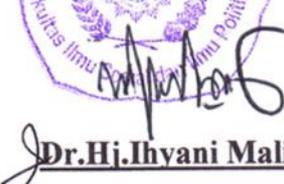
Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos. M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



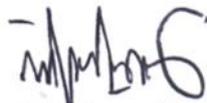
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0014/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. **Dr. Muhlisi Madani, M.Si**
2. **Dra. Hj. Juliyati Saleh, M.Si**
3. **Dr. Anwar Parawangi, M.Si**
4. **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safitri Handayani

Nomor Stambuk : 105610467913

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2017

Yang Menyatakan,

Safitri Handayani

ABSTRAK

SAFITRI HANDAYANI . 2017. Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Makassar (dibimbing oleh Juliati Saleh dan Adnan Ma'ruf)

Fungsi Inspektorat merupakan fungsi pengawasan Pemerintahan Daerah. Dimana fungsi pengawasan dapat secara efektif dan efisien dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat menilai sejauh mana tingkat kinerja pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif langsung ke objek penelitian dalam penelitian ini dikumpul dengan data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan tipe fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Pemerintah menilai dan periksa sejauh mana kebijakan Penyimpangan dalam Pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar. (2) Dengan di lakukan pengawasan pemerintah dapat menguji secara langsung permasalahan yang terjadi. (3) Pelaksanaan penyelidikan dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah sehingga informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dapat dijadikan obyek pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada kantor inspektorat daerah di kota Makassar, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan, ternyata pemeriksaan pengawasan belum efektif hal ini disebabkan karena belum adanya ketepatan waktu dari bidang-bidang yang sering terjadi. Adanya pelaporan ke pimpinan tingkat atas terhadap pelaksanaan pengawasan yang di lakukan pihak inspektorat membuat harapan besar untuk tercapai pengawasan yang efektif dan mencapai target yang ingin dicapai.

Kata Kunci : Pelaksanaan , Fungsi Inspektorat , dan Pengawasan.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua tercintaku ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga kepada kakakku tercinta, dan seluruh keluarga besarku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Hj. Juliyati Saleh, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin. S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada keluargaku Ibu Bapak dan Saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan sehingga segala urusan penulis selama ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap staf dan seluruh karyawan Inspektorat Kota Makassar yang telah membantu penulis dan memberikan waktunya untuk penulis melakukan wawancara dalam penelitian guna penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati aktifitas mereka.
7. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 khususnya kelas VIII B serta teman-teman yang tak sempat penulis sebut satu persatu terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dengan suka dan duka sehingga penulis mengerti arti sebuah kebersamaan.

8. Sahabat-sahabatku Lani Ramadhani, Siti Sartika, efiqholik dan Andi Haswira, yang senantiasa memberikan support, masukan bagi penulis serta rela mendengar keluhan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan magfirah-Nya untuk kalian
9. Serta seluruh rekan-rekan dan pihak yang tidak bisa di sebutkan satu per satu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan.....	7
B. Fungsi Inspektorat.....	15
C. Pemerintahan Daerah	17
D. Kerangka Pemikiran.....	19
E. Fokus Penelitian	20
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26

G. Pengabsahan Data	26
---------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Objek Penelitian	28
B. Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah Di Kota Makassar.....	39
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar	56

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan	64
E. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka terciptanya *good goverment* dan *clean governance* maka, meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Dalam hal ini, ditandai oleh tuntunan bagi masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. Manullang (2006:13)

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan. Victor (2011 : 16).

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namaun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada

pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No.VII Tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat kota Makassar, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) berubah menjadi Inspektorat. BAWASDA atau Inspektorat melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan keuangan pada instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah.

Kantor Inspektorat di kota Makassar yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian.

Sekretariat Inspektorat Daerah di Kota Makassar dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja

sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Peraturan Walikota Makassar nomor 15 tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada inspektorat kota Makassar.

Sehingga Pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena a) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, b) Pelaksanaan pengujian, dimana salah satu faktor yang menyebabkan ketidak akuratan data yang diperoleh di sebabkan kurang siapnya pihak penyelenggara pemerintah didalam melengkapi data yang diinginkan pihak inspektorat sehingga dibutuhkan waktu lagi untuk menunggu data tersebut untuk dilengkapinya. c) pelaksanaan pengusutan belum efektif di mana hanya sekali setahun melakukan pengawasan padahal sebuah program yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak harus dilakukan sebuah pengawasan dan pengusutan yang kontinyu seperti melakukan pengawasan langsung setiap bulan sekali, semua ini untuk terciptanya sebuah program yang tepat pada sarannya.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kota Makassar sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administrative maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa inspektorat kota makassar kembali menggelar pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan inspektorat menemukan masalah pengelolaan keuangan dan masalah administrasi pada unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah lingkup pemkot makassar. Pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan proposal dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka latar belakang penelitian adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Fungsi Inspektorat dalam pengawasan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian fungsi pengawasan sebagai lembaga Fungsi Inspektorat di dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah
 - b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian atau peneliti yang lain mengenai Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah di Kota Makassar terutama di Inspektorat untuk meningkatkan kualitas kontrolnya secara profesional dan akuntabel berdasarkan amanah Undang-Undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Siagian (2011:16) mengemukakan bahwa: pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengawasan menurut Situmorang (Makmur 2011:176) mengemukakan bahwa: pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan argumentasi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. (Siagian, 2011 : 181)

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Suryanty Fabanyo (2010 : 94) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila sesuatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut (Siswandi 2009 : 200) adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi . Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan

dicatat secara tepat,bermacam-macam pasar organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di damping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi,dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan,manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah diagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahnya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya secara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplemenatsikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan

sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi mematikan kreativitas, dan sebagainya yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Siswandi (2009 : 12) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan kemudian mencari solusi yang tepat.

3. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 15) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang

telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan mestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah, terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

4. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam konsep pengawasan ada hal yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan konsep ini secara efektif. Berikut jenis-jenis pengawasan menurut Makmur (2011:186) yaitu :

1. Pengawasan fungsional. Kelembagaan atau organisasi apa pun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu

secara fungsional, tetapi kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.

2. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama pengguna sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintahan, misalnya menipulasi pajak, keuangan dan lain sebagainya.
3. Pengawasan administratif. Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
4. Pengawasan teknis. Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan administratif, sesungguhnya tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan dibidang perikanan, pekerjaan, industri dan lain sebagainya.
5. Pengawasan pimpinan. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan

kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.

6. Pengawasan barang. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
7. Pengawasan jasa. Jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu untuk memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
8. Pengawasan internal. Apabila kita melihat bahwa kelembagaan itu memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan di dalamnya, misalnya kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.
9. Pengawasan eksternal. sejalan dengan argumenatsi yang kita kemukakan pada poin kedelapan tersebut di atas, maka kebalikan pengawasan internal

tersebut dengan pengaawasan eksternal, yaitu pengawasan yang di lakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar kelembagaan tertentu, misalnya di negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efesien dari pada seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

Penggunaan jenis pengawasan sebenarnya disesuaikan dengan pekerjaan atau dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan karena setiap lembaga memiliki kegiatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

5. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan menurut Makmur (Ismail, 2012:16)

1. Ekspalansi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
2. Akuntabilitas, merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberanntas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi)

3. Periksa, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

B. Fungsi Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 3 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 218 PP No. 79 tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Disamping itu inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan dibidang fungsional
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya.

3. Pelaksanaan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
4. Pelaksanaan, pengusutan, pengujian dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.
5. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah
6. Pelaksanaan fasilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi
7. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)
8. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang pengawasan
10. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Fungsi-fungsi Inspektorat Daerah , meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Inspektorat Kota/kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

C. Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".daerah.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Sementara itu syakrani (2008:57) menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance*. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang terwujudnya *good governance* tapi ada juga yang menghambat terwujudnya *good governance*. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendukung

- a. Partisipasi

Partisipasi mewujudkan Aparat pemerintah yang bersih, bermoral dan proaktif serta *check and balance*.

- b. Transparansi

Transparansi mengatur kewajiban pemerintahan untuk memberikan informasi serta menunjang prinsip *good governance*.

2. Faktor Penghambat

a. Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah masih kurang pemahaman dalam masyarakat dan mengenai *good governance* sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka.

b. SDM

SDM untuk mewujudkan *good governance* yang kurang.

D. Kerangka Pemikiran

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar, maka perlu dilaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang kongkrit tentang pelaksanaan fungsi inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar, dengan berpedoman pada indikator-indikator pengawasan yaitu pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian.

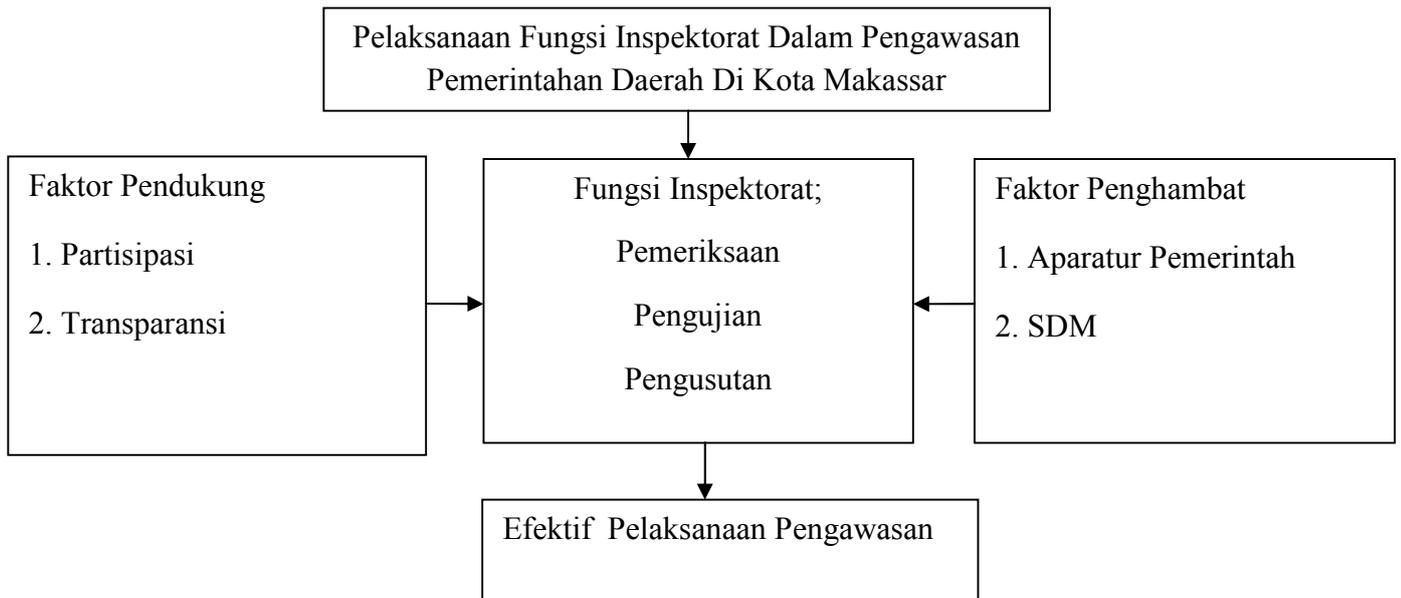
Pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Karena dengan adanya pengawasan, baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan motivasi bagi para tenaga kerja untuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Pengawasan yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor pendukung dan faktor penghambat.

Apabila dalam pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kota Makassar sesuai dengan prosedur maka efektivitas pengawasan akan dapat terwujud dan pekerjaan akan menghasilkan tujuan yang sesuai dengan rencana sebelumnya. Untuk lebih

memahami alur pemikiran di atas tentang Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar, maka penelitian menggambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintah Daerah di Kota Makassar serta faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap fungsi inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah di kota makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- b. Inspektorat daerah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di dalam penyelenggaraan pemerintah.
- c. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data atau keterangan yang akan dilaksanakan secara obyektif.
- d. Pengujian adalah proses mengaturkan Satu alat yang sistematis untuk menilai dan mengukur perubahan dalam sesuatu aspek tingkah laku untuk menentukan tingkat pencapaian.
- e. Pengusutan adalah kasus yang berkelanjutan sehingga membutuhkan bukti apabila timbul dugaan penyimpangan dan peyelewanan maka dibutuhkan tindakan pidana.
- f. Faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi motivasi dalam menjalankan suatu pekerjaan yang baik terhadap sesuatu pembelajaran. Yang mencakup yaitu; Partisipasi dan Transparansi.
- g. Faktor Penghambat adalah hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang mencakup yaitu; Aparatur Pemerintah dan SDM
- h. Efektif Pelaksanaan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang sudah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua bulan) dari tanggal 14 Juni sampai 22 September yang berlokasi di Kota Makassar. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi penyelewengan terhadap Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar yang belum terlaksana dengan baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah yang diteliti mengenai Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) dan wawancara yang dilakukan berasal dari informan-informan yang terlibat langsung mengenai Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti sesuai yang diharapkan dan mendapatkan data yang akurat dan akuntabel di Kota Makassar.

Tabel 1 : Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Dahyal, S.Sos.M.Si	DA	Sekretaris	1
2	Hendra Cipta, S.Kom	HE	Kepala Sub Bagian Adminstrasi dan Umum (Tokoh Pemerintahan)	1
3	Drs.Suwandi	SU	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan kekayaan (Tokoh Pemerintahan)	1

4	Suhartini, ST	SH	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan (Tokoh Pemerintahan)	1
5	Jusman Madjid,SH,M.Si	JU	Kasubag Perencanaan (Tokoh pemerintahan)	1
6	Aini Inna	AI	Anggota Inspektorat	1
7	Irwan	IR	Anggota Inspektorat	1
8	Yusriani,SE	YU	Anggota Inspektorat	1
9	Hardi	HA	Selaku FOPPSI (Forum Operasional Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia)	1
	Jumlah			9

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Di samping itu, observasi dilakukan untuk mendapatkan data sekiranya terdapat hal-hal yang dijelaskan sebelumnya.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dengan wawancara beberapa informan maka dapat diketahui dengan jelas wilayah Kota Makassar, tujuan, visi dan misinya, prestasi, perkembangan, kendala dan hasil yang diperoleh. Metode penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap penting (*stakeholder*) dari

Pemerintah Kota Makassar, Sekretaris Inspektorat Dan Anggota Inspektorat serta Tokoh Pemerintahan di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen hasil penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan alat digunakan oleh peneliti untuk mengelolah data menjadi hasil penelitian dimana data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada 3 komponen yang harus diperhatikan yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu merangkum dan menfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar.

2. Penyajian Data

Yaitu merupakan salah satu dari teknik analisis data. Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti dalam hal ini Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar . Bentuk penyajian data dapat berupa catatan lapangan grafik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data

yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka lakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Inspektorat Kota Makassar

Inspektorat Kota Makassar adalah suatu badan instansi Pemerintah yang berada di Daerah Kota Makassar dan terletak diperumahan Griya Fajar Mas Jalan Teduh Bersinar No 7 Makassar. Inspektorat Kota Makassar dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Makassar.

Kedudukan Inspektorat Kota Makassar yaitu Inspektorat Kota Makassar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan walikota di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Inspektorat Kota Makassar yaitu:

1. Penyusunan kebijaksanaan teknis pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Penyusunan kebijaksanaan teknis pengusutan terhadap keberadaan laporan/pengaduan penyimpangan wewenang pada unit kerja
3. Pengendalian dan pelaksanaan teknis oprasional dalam rangka pemberdayaan pengawasan daerah.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Adapun Visi dari Inspektorat Kota Makassar adalah **“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan professional”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang ditetapkan
2. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/fungsional
3. Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta responsive
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah
5. Menumbuhkan sinergi antar aparat pengawasan

Strategis Operasional Inspektorat Kota Makassar

Strategis operasional Inspektorat kota Makassar yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan diprioritaskan pada objek pemeriksaan yang strategis dan dianggap rawan, utamanya instansi penghasil PAD.
- 2) Pemeriksaan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran keuangan.
- 3) Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan pembangunan/proyek strategik.
- 4) Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategik.
- 5) Pelaksanaan evaluasi terhadap lakip instansi/unit-unit kerja

- 6) Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer.
- 7) Pengembangan SDM Inspektorat antara lain melalui diklat sertifikasi JFA dan diklat teknis substansi/ mandiri.
- 8) Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah di atasnya.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar

Susunan organisasi inspektorat Kota Makassar berdasarkan peraturan walikota Makassar nomor 15 tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Bagian tata usaha, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Administrasi umum
 - b. Sub bagian Program dan perencanaan
 - c. Sub bagian pelaporan dan evaluasi
4. Inspektur pembantu bidang pembangunan
5. Inspektur pembantu bidang pemerintahan
6. Inspektur pembantu bidang Kemasyarakatan
7. Inspektur pembantu bidang Keuangan dan kekayaan
8. Kelompok jabatan Fungsional Auditor, terdiri atas:
 - a. Kelompok jabatan fungsional auditor pengawasan pemerintahan dan pengawasan
 - b. Kelompok jabatan fungsional auditor pengawasan keuangan dan pembangunan

- c. Kelompok jabatan fungsional auditor pengawasan peralatan dan kekayaan
- d. Kelompok jabatan fungsional auditor pengawasan aparatur dan kesatuan bangsa.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor Inspektorat Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar nomor 15 tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada inspektorat kota Makassar berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1, peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar
6. Kepala Inspektorat selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kota Makassar
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kota Makassar
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Makassar
9. Subbagian Adalah Subbagian Pada Inspektorat Kota Makassar
10. Auditor Adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dalam instansi pemerintah

11. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat.

Tugas dan fungsi dan jabatan pada kantor inspektorat kota Makassar berdasarkan peraturan walikota Makassar nomor 15 tahun 2014, yaitu :

Tugas dan fungsi kantor inspektorat daerah kota makassar

1. Nama dan Jabatan Inspektur

- a. Tugas dan Pokok : Membantu Inspektur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemeritahan daerah. Serta pelaksanaan kesekretariatan inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Fungsi : Melakukan penyusunan dan perencanaan program pengawasandan perumusan kebijakan, pemeriksaan ,pegusutan dan pengujian dalam tugas pengawasan.

2. Nama jabatan sekretariat

- a. Tugas Pokok : Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggraan dan koordinasi pelaksanaan

pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dan lingkup inspektorat kota makassar.

b. Fungsi : Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja pengawasan dan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.

3. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok : Menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan.

4. Nama jabatan kepada sub bagian perencanaan dan pelaporan
 - a. Tugas Pokok : Meyiapkan bahan ,penghimpun mengelola, menilai dan melaksanakan administrasi perencanaan pelaporan.
 - b. Fungsi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. dan pembinaan, pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
5. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan
 - a. Tugas Pokok : Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, menilai dan melaksankan administrasi pengelola, menilai, dan melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi penilaian dan pelaporan keuangan.
 - b. Fungsi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian keuangan pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan pembinaan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
6. Nama Jabaan Inspektur Pembantu Wilayah I
 - a. Tugas Pokok : Inspektur pembantu wilayah I dipimpin oleh seorang inspektur pembantu dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan pada wilayah I.

- b. Fungsi : Melakukan perencanaan program pengawasan pada wilayah I, melakukan perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan melakukan pembantuan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I

7. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah II

- a. Tugas Pokok : Inspektur pembantu wilayah II dipimpin oleh seorang inspektur pembantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.

- b. Fungsi : Melakukan perencanaan program pengawasan pada wilayah II, melakukan perumusan,

pengkoordinasian kebijakan dan memberikan petunjuk, mengawasi serta membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II.

8. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah III

- a. Tugas pokok : Inspektur pembantu wilayah III di pimpin oleh seorang inspektur pembantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
- b. Fungsi : Melakukan perencanaan program pengawasan pada wilayah III, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III

9. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah IV

- a. Tugas Pokok : Inspektur pembantu wilayah IV di pimpin oleh seorang inspektur pembantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada bidang pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.

- b. Fungsi : Melakukan perencanaan program pengawasan pada wilayah IV, melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran dan tindak lanjut.

10. Kelompok jabatan fungsional

Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada pasal 9 yaitu :

- a. Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dengan tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Kelompok Jabatan Fungsioanal Auditor menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan dan penyusunan daftar materi audit
 - 2) Perumusan dan penyusunan program kerja audit
 - 3) Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan audit
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan inspektur

B. Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar

Fungsi pengawasan sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Sistem organisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam organisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula yang terjadi pada lingkungan pemerintah daerah kota makassar. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat, Kota Makassar. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat di Kota Makassar, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah kota Makassar ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Adapun hasil penilaian efektivitas dari masing-masing pelaksanaan pengawasan di Kantor Inspektorat kota Makassar, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat kota makassar, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada kasus pungutan liar disekolah-sekolah terkait penerimaan dana gratis, maka pengawasan pemerintahan

daerah menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh inspektorat tersebut, dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kota Makassar.

Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Inpektorat Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

“Selama ini pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap pengawasan pemerintahan di kota makassar menurut saya sudah efektif, dimana salah satunya ialah proses pemeriksaannya dilakukan setiap bulan dan harus dilaporkan di kantor inspektorat dalam bentuk laporan secara tertulis dan apabila terjadi permasalahan akan dilakukan pembinaan di dalamnya”. (Wawancara DA ,19 Juni 2017)

Hal senada juga dikemukakan oleh tokoh pemerintahan pengawasan dengan kepala bidang pembangunan mengatakan bahwa:

“Sudah sangat efektif dan efisien karena melakukan pemeriksaan secara langsung atau turun ke lapangan dan memeriksa tanggung jawab setiap pekerjaan, setelah melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di serahkan ke walikota makassar dan pemeriksaan dilakukan sebulan sekali tanggal dan waktu tidak ditentukan”.(Wawancara SU,19 Juni 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian menggambarkan bahwa dimana pelaksanaan fungsi inspektorat dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan maksimal, ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat, akan tetapi masih terdapat indikasi-indikasi yang masih belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan pemerintahan seperti masih terjadi ketidak disiplin pegawai, artinya pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat sebagaimana hal diatas tidak efektif. Berbeda halnya

yang dikemukakan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemeriksaan selama ini belum efektif dengan baik, dimana tenaga pemeriksaan belum menetapkan bidang penyimpangan yang paling sering terjadi”. (Wawancara AI ,21 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan salah satu anggota inspektorat dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan pemeriksaan masih belum efektif, penyebab dari kurang efektifnya pemeriksaan ialah dimana tenaga pemeriksa belum menetapkan bidang penyimpangan, persoalan ini membuat permasalahan-permasalahan terus terjadi.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang pembangunan yaitu sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh tenaga pemeriksaan adalah penilaian obyektif bidang pengawasan secara keseluruhan dan mudah dipahami”(Wawancara SU ,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan kepala bidang Pembangunan pada Kantor Inspektorat bahwa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu pemeriksaan obyektif pelaksanaan pemeriksaan dari masing-masing bidang pengawasan dan mudah dipahami. Oleh karena itulah dibutuhkan tenaga pemeriksa yang berkompeten yang sesuai pada tempat di bidangnya.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian Admisitrasi dan umum mengatakan bahwa:

“Menurut saya faktor pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan terkoordinasi dengan baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) sudah menetapkan bidang-bidang penyimpangan. (Wawancara HE,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang sebagaimana telah dilakukan dengan kepala sub bagian administrasi dan umum sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam bidang pembangunan sudah terkoordinasi dengan baik karena sudah menetapkan bidang-bidang penyimpangan. Berbeda halnya yang dikemukakan dari hasil wawancara oleh salah satu anggota Inspektorat yaitu sebagai berikut:

“Faktor yang menyebabkan dibidang pembangunan adalah kurangnya koordinasi kepada tenaga pemeriksa.(Wawancara AI ,21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan bidang pembangunan pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan dikantor inspektorat kota makassar adalah kurangnya koordinasi terhadap tenaga pemeriksa dan masih lambat melakukan tugas dan wewenangnya.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan SKPD di Inspektorat Kota Makassar yaitu terdiri dari 54 SKPD.Pemeriksaan dilakukan setiap bulan tergantung surat tugasnya dimana yang akan diperiksa.” (Wawancara SW,19 Juni 2017)

Objek pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar yaitu terdiri dari 54 SKPD yang berada di wilayah lingkup Pemerintah Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) yang terdiri atas: PD. Makassar Raya, PD. Parkir, Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan daerah air minum (PDAM) dan Terminal yang berada di wilayah Kota Makassar dengan sistem pemeriksaan yakni pemeriksaan dilakukan setiap bulan. Untuk tahun 2016 dilakukan sistem pemeriksaan triwulan yakni setiap 3 bulan dilakukan

pemeriksaan, dan dalam satu tahun dilakukan 4 kali pemeriksaan dalam satu SKPD berdasarkan PKPT.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat kota Makassar mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pemeriksaan belum terlaksana dengan baik sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan aparat pemerintah dan dibutuhkan tenaga pemeriksa yang bersih, jujur serta bertanggung jawab sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui adanya penyimpangan dan penyelewengan yang di temukan di lapangan.(Survei SA,23 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Inspektorat mengatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan belum terlaksana dengan baik sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan aparat pemerintah dan dibutuhkan tenaga pemeriksa yang bersih, jujur serta bertanggung jawab sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui adanya penyimpangan dan penyelewengan yang di temukan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan harus setiap 2 minggu sepekan di lapangan sehingga oknum-oknum yang sering melakukan penyimpangan dan penyelewengan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Hasil Survei peneliti temukan di kantor Inspektorat Kota Makassar bahwa:

“Fasilitas yang tersedia di kantor inspektorat sudah memadai, fasilitas yang memadai yaitu mobil yang digunakan untuk mengantar auditor untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan, semua pegawai sudah mempunyai kendaraan, kendaraan roda dua, kantor yang hampir tiap tahunnya dibenahi agar terlihat lebih bersih dan terkesan tidak anker ruang dilengkapi AC,mesin fotocopy,computer dll (Hasil survei SA,23 Juni 2017)

Berdasarkan hasil survei peneliti temukan bahwa kelengkapan fasilitas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dapat berpengaruh dengan kinerja inspektorat, masalah fasilitas bisa menjadi faktor terhambatnya kinerja inspektorat saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Fasilitas sarana dan prasarana yang

terdapat di kantor Inspektorat Kota Makassar 90% sudah memadai dan menunjang aktivitas pengawasan dan pemeriksaan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala Kesubag Perencanaan mengatakan bahwa:

Kasus yang ditangani selama melakukan pemeriksaan dilapangan pada tahun 2015 mencapai 51 kasus, sedangkan tahun 2016 mencapai 48 kasus, dan tahun 2017 mencapai 44 kasus. Kasus yang sering ditemukan di kota makassar adalah Dinas Pendidikan dan Kecamatan Tamalate. Dinas Pendidikan mengenai keuangan yang belum efektif dan terdapat adanya pungli (pungutan liar) sehingga tenaga pemeriksa perlu memberikan surat teguran terhadap bagian keuangan dan apabila masih terus berlanjut maka akan diberikan sanksi atau dipecat sedangkan pada kecamatan tamalate mengenai pelayanan publik dan kebersihan keluhan dari masyarakat tersebut mencapai 44 laporan. (Wawancara JU, 22 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kesubag perencanaan mengatakan bahwa Kasus yang ditangani selama melakukan pemeriksaan dilapangan pada tahun 2015 mencapai 51 kasus, sedangkan tahun 2016 mencapai 48 kasus, dan tahun 2017 mencapai 44 kasus. Kasus yang sering ditemukan di kota makassar adalah Dinas Pendidikan dan Kecamatan Tamalate. Pengaduan Dinas Pendidikan mengenai pemeriksaan keuangan yang belum efektif ditemukan adanya pungli sehingga diberikan surat teguran dari pemerintah Kota Makassar apabila diulangi kembali maka akan di berikan sanksi atau dipecat sedangkan kecamatan Tamalate pengaduannya mengenai pelayanan publik dan kebersihan yang mencapai 44 laporan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian Adminstrasi dan umum mengatakan bahwa;

“Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, apabila ombusman adanya Maladministrasi, Ombusman akan menerbitkan rekomendasi yang isinya antara lain mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh terlapor, dan terlapor wajib menyampaikan kepada ombusman tentang pelaksanaan

rekomendasi yang telah dilakukan. Hasil pemeriksaanya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi tersebut.(Wawancara HE,15 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub bagian Administrasi dan Umum mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut, apabila ombusman adanya Maladministrasi, Ombusman akan menerbitkan rekomendasi yang isinya antara lain mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh terlapor,dan terlapor wajib menyampaikan kepada ombusman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan disertai hasil pemeriksaanya dalam waktu paing lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan pegawai selaku FOPPSI (Format Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia) Dinas Pendidikan mengatakan bahwa:

Tahun 2016 SMAN 1 dan SMAN 5 makassar dibidik polisi lantaran terindikasi pungli, sekiranya wajarlah muridnya saja tajir-tajir jika berangkat kesekolah mereka mengemudikan mobil sendiri. (Wawancara HA,22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dinas pendidikan mengatakan bahwa tahun 2016 SMAN 1 dan SMAN 5 makassar dibidik polisi lantaran terindikasi pungli, sekiranya wajarlah muridnya saja tajir-tajir jika berangkat kesekolah mereka mengemudikan mobil sendiri Pungutan dilakukan modus biaya tambahan les dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibebankan kepada siswa kelas 1, biaya yang dibebankan ke siswa sebesar Rp.200,000 per bulan. Bahkan, wali kelas 1 meminta biaya tambahan les dibayar dua bulan kedepan dengan nilai Rp.400,000. Padahal kegiatan les tambahan disekolah baru berjalan selama dua minggu. Pungutan sebesar Rp. 200,000 perbulan itu. Dirasa sangat

memberatkan para orang tua siswa tidak pernah diberitahukan secara tertulis dari pihak sekolah tentang les tambahan dengan biaya Rp. 200,000 per bulan.

2. Pengujian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kantor inspektorat daerah kota makassar, maka penilaian selanjutnya dalam melakukan efektivitas pengujian pada kasus Pungutan Liar terkait penerimaan dana gratis pada sekolah-sekolah yang menerapkan pada pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Sekretaris Inspektorat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengujian selama ini yang kami lakukan sudah cukup baik karena koordinasi yang dilakukan sesama pihak yang terkait dalam melakukan pengujian atas persoalan yang terjadi di dalam pemeriksaan sudah baik”.(Wawancara DA,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Inspektorat Kota Makassar mengatakan bahwa dimana inspektorat dalam melakukan pengujian telah koordinasi dengan pihak yang terkait atas apa yang telah terjadi dari penemuan-penemuan dari pemeriksaan selama ini berjalan dengan baik. Pada dasarnya kerjasama yang baik dengan orang lain dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan proses kerja dalam sebuah organisasi/ lembaga .Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, baik pekerjaan fisik maupun kerjasama dalam pemberian informasi akan memberikan nilai lebih. Dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak memakan waktu yang cukup lama.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengujian dari temuan persoalan-persoalan yang terjadi seharusnya pihak inspektorat melibatkan pihak yang terkait”.(Wawancara SW,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan megatakan bahwa di mana selama ini pengujian terkait dengan peroalan-persoalan yang telah ditemukan setelah pemeriksaan tidak melibatkan langsung untuk melakukan proses pengujian dengan pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengawasan pemerintahan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian administrasi dan umum mengatakan bahwa:

“Selama ini dari proses pengujian di lakukan pihak inspektorat belum ada hasil yang tepat, di mana hasil pengujian di lakukan selama ini tertutup”.(Wawancara HE,19 Juni 2017)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sub bagian administrsi dan umum mengatakan bahwa dalam melakukan proses pengujian ada beberapa persoalan yang telah dilakukan pengujian tidak ekspose ke media atau kemasyarakatan sehingga sebagian masyarakat berpikir bahwa proses pengujian yang di lakukan tertutup. Berbeda halnya yang dikemukakan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengujian yang dilkukan belum akurat, dimana data/informasi yang diperoleh belum dapat dijadikan pedoman dan valid”(Wawancara AI, 21 Juni 2017)”

Bedasarkan hasil wawancara peneliti yang telah dikemukakan di atas, maka salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian adalah data

yang tidak akurat, dimana salah satu faktor yang menyebabkan ketidak akuratan data yang diperoleh di sebabkan kurang siapnya pihak penyelenggara pemerintah didalam melengkapi data yang di inginkan pihak inspektorat sehingga dibutuhkan waktu lagi untuk menunggu data tersebut untuk dilengkapinya. Hal inilah yang terjadi saat sekarang sehingga di butuhkan pembinaan di dalam kesiapan melengkapi data-data setiap bulan dari kegiatan-kegiatan dilakukan sehingga di dalam pengawasan bisa lebih efisien dan efektif.

Hal senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengujian yang dilakukan tidak obyektif karena pengujian tidak didasari oleh bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi”.(Wawancara IR, 21 Juni 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang sebagaimana telah dilakukan dengan salah satu anggota inspektorat ternyata dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang di terima tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum adanya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para pihak sekolah dalam hal ini program pendidikan gratis.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Inspektorat mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pegawai tentunya apa yang menjadi aturan dalam pengujian di internal inspektorat ada aturan dan regulasi yang kami jadikan sebagai landasan”(Wawancara YU,21 Juni 2017)

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa ada aturan dan regulasi yang menjadi landasan pihak inspektorat dalam melakukan pengujian atas temuan dari pemeriksaan terhadap pengawasan pemerintahan di kota makassar. Sebagai bawahan arahan atau kebijakan dari pimpinan dapat mempengaruhi proses pengujian yang akan di lakukan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kesubag Perencanaan mengatakan bahwa:

“Kami selaku tenaga pemeriksa tidak serta merta mengambil kebijakan sendiri harus sesuai dengan keputusan pimpinan dan apabila kasus yang sangat sulit perlu diberikan surat teguran dan melapor ke walikota makassar agar laporan yang masuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengujian sehingga data tersebut dapat dijadikan informasi secara akurat”.(Wawancara JU,22 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kesubag Perencanaan mengatakan bahwa Kami selaku tenaga pemeriksa tidak serta merta mengambil kebijakan sendiri harus sesuai dengan keputusan pimpinan dan apabila kasus yang sangat sulit perlu diberikan surat teguran dan melapor ke walikota makassar agar laporan yang masuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengujian sehingga data tersebut dapat dijadikan informasi secara akurat.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian administrasi dan umum mengatakan bahwa:

“Dengan cara mengumpulkan bukti auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan. Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan informasi. Bukti tersebut dapat digolongkan yaitu; bukti fisik,bukti dokumen,bukti kesaksian dan bukti analisis”.(Wawancara HE, 15 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sub bagian administrasi dan umum mengatakan bahwa Dengan cara mengumpulkan bukti

auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan. Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan informasi. Bukti tersebut dapat digolongkan yaitu; bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian dan bukti analisis. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari orang secara langsung seperti; foto gambar, bagan dan peta. Bukti dokumen yaitu; bukti yang informasi tertulis seperti surat kontrak, catatan akuntansi, fakta dan informan. Bukti kesaksian yaitu bukti yang melalui wawancara, kuisisioner dan pernyataan tertulis. Bukti analisis bukti yang di kembangkan oleh auditor berupa perbandingan nasabah, perhitungan dan argumen logis.

Hasil wawancara peneliti dengan pegawai selaku FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia) pada Dinas Pendidikan mengatakan bahwa:

“Dimana penerimaan siswa-siswi sekolah secara online, justru kepala sekolah bermain secara offline alias lewat jendela (let jend) dengan cara menipulasi data penerimaan siswa baru. Caranya kepala sekolah melaporkan ke operator provider penyedia sistem online”. (Wawancara, HA Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Dimana penerimaan siswa-siswi sekolah secara online, justru kepala sekolah secara online, justru kepala sekolah bermain secara offline alias lewat jendela (let jend) dengan cara menipulasi data penerimaan siswa baru. Caranya kepala sekolah melaporkan ke operator provider penyedia sistem online. Saat penerimaan siswa baru secara online hanya menerima sebanyak 29 siswa ini adalah siswa yang masuk secara offline atau tidak dilaporkan ke operator. Akan halnya SMAN 1 , demikian pula SMAN 5 Makassar melaporkan modus biaya tambahan les dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibebankan kepada siswa kelas 1 biaya yang dibebankan siswa sebesar Rp.200,000 per bulan.

3. Pengusutan

Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain dari pada pemeriksaan dan pengujian juga di tunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itulah perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan pada kasus Pungutan Liar disekolah-sekolah terkait penerimaan Dana Gratis sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan dan penyelewengan terhadap kasus tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Inspektorat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Salah satu misi yang dilakukan dalam pengusutan adalah mempermudah untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan atas informasi dari berbagai pihak”.(Wawancara DA, 19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan atau informasi dari berbagai pihak.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Keuangan dan Kekayaan mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan inspektorat untuk melakukan pengusutan di lakukan sekali dalam setahun akan tetapi laporan harus masuk tiap bulan, apabila ketika terjadi permasalahan di setiap pengawasan pemerintahan maka inspektorat dalam hal ini melakukan sebagaimana fungsinya yaitu melakukan pembinaan” (Wawancara SW,19 Juni 2017)

Terkait penjelasan di atas peneliti menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat pengusutan persoalan tidak efektif, di mana hanya sekali setahun melakukan pengawasan langsung ke pemerintahan padahal sebuah program yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak harus dilakukan sebuah pengawasan dan pengusutan yang kontinyu seperti melakukan pengawasan langsung setiap bulan sekali, semua ini untuk terciptanya sebuah program yang tepat pada sasarannya. Kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka akan disajikan

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu dan belum obyektif” (Wawancara AI, 21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagaimana telah dilakukan ternyata dalam pelaksanaan penyelidikan belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan.

Hal senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Inspektorat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan belum terpusat yakni belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi” (Wawancara AI, 21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelidikan nampak belum tepat, alasannya karena dalam melakukan penyelidikan tenaga penyidik khususnya pada Kantor Inspektorat di

Kota Makassar nampak belum didasari berdasarkan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. Kemudian pelaksanaan penyelidikan khususnya pada Kantor Inspektorat yang selama ini belum dilakukan secara tepat/efektif.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Inspektorat di Kota Makassar yaitu :

“Pelaksanaan penyelidikan terhadap bidang-bidang yang menyimpang semakin tidak sesuai dengan yang ditargetkan, Hal ini disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara tenaga pemeriksa dengan tenaga penyelidik dalam memeriksa penyimpangan yang terjadi”. (Wawancara IR,21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat pada Kantor Inspektorat di Kota Makassar, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan penyelidikan belum terpusat dalam bidang-bidang penyimpangan yang terjadi dan selain itu pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu.

Hasil survei peneliti temukan di Kantor Inspektorat bahwa:

“Peneliti melihat salah satu kekurangan di Inspektorat Kota Makassar adalah kurangnya organisasi yang dimiliki pegawai. Ini sangat penting bagi pelaksanaan tugas. Tanpa adanya pengetahuan yang baik tentang organisasi saya yakin banyak pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian agar biasa memahami cara kerja organisasi.(Hasil survei SA,23 Juni 2017)

Berdasarkan survei diatas peneliti mengasumsikan bahwa pengawasan inspektorat belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena pengalaman organisasinya masih minim, seharusnya sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan harus punya pengalaman organisasi. Tanpa suatu organisasi maka suatu pekerjaan tidak berjalan lancar.

“Chester I. Bernard organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang di lakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan”.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala kesubag perencanaan mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengusutan dilakukan dengan cara penyelidikan terhadap kasus yang ditangani oleh pihak pemeriksa apakah kasus tersebut berat atau sedang apabila kasus tersebut berat maka dilakukan 4 kali pemeriksaan dan apabila terbukti bersalah maka di laporkan di walikota makassar agar di tindak lanjuti sedangkan kasus ringan dapat kami atasi dan akan diberikan surat panggilan. (Wawancara JU,22 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala kesubag perencanaan mengatakan bahwa pelaksanaan pengusutan dilakukan dengan cara penyelidikan agar kasus tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Kasus yang ditangani oleh tenaga pemeriksa yaitu kasus berat dan ringan. Kasus berat contoh korupsi atau pembunuhan berencana biasanya di vonis 5-7 tahun penjara tergantung kasus yang ditangani sedangkan kasus ringan contohnya sering terlambat masuk kantor atau tidak mengikutu rapat selama kegiatan berlangsung. Kasus berat dilakukan 4 kali pemeriksaan dan apabila terbukti bersalah maka di laporkan di walikota makassar agar di tindak lanjuti sedangkan kasus ringan dapat kami atasi dan akan diberikan surat panggilan untuk datang ke kantor inspektorat memberikan keterangan dalam permasalahan yang terjadi.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian administrasi dan umum mengatakan bahwa:

“Kami juga meminta kepada ombusman agar setiap laporan evaluasi dikirimkan ke inspektorat sehingga nantinya kami tahu apa yang salah dan dapat berkoordinasi lagi yang lebih baik lagi bersama Ombusman untuk meningkatkan pelajaran yang semakin baik”.(Wawancara HE,15 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara penelitian dengan kepala sub bagian administrasi dan umum mengatakan bahwa Ombusman agar setiap laporan evaluasi dikirimkan ke Inspektorat sehingga nantinya kami tahu apa yang salah dan dapat berkoordinasi yang lebih baik lagi bersama Ombusman untuk meningkatkan pelajaran yang semakin baik. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebabnya sudah di sadari oleh semua pihak baik yang diawasi maupun pihak yang mengawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih.

Hasil wawancara peneliti dengan pegawai Selaku FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia) pada Dinas Pendidikan mengatakan bahwa:

Pungli memang tidak masuk akal, akan tetapi marak terjadi penyusupi dunia pendidikan,khususnya ketika tahun ajaran baru/ penerimaan murid baru . dalam penerimaan siwa/wi baru tersebut”oknum “ kepala sekolah aktor utamanya. Herman Hafid (Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 1). (Wawancara, HA Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara pungli memang tidak masuk akal, akan tetapi marak terjadi penyusupi dunia pendidikan,khususnya ketika tahun ajaran baru/ penerimaan murid baru . dalam penerimaan siwa/wi baru tersebut”oknum “ kepala sekolah aktor utamanya. Herman Hafid (Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 1).bernyali besar melaporkan dua kepala sekolah menengah atas ke polrestabes makassar atas dugaan pungli penerimaan siswa baru tahun ajaran 2016. Kedua kepala sekolah tersebut adalah kepala sekolah SMAN 1 makassar Abdul Hajar

dan Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar Muhammad Yusran. Herman menjelaskan bahwa,” kedua kepala sekolah ini secara terang-terangan melakukan pungli pada penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2016.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Inspektorat

Dalam kegiatan penelitian ini,terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah kota makassar,faktor -faktor tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu : faktor Pendukung dan faktor penghambat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung. Dalam upaya pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah kota makassar terdapat beberapa faktor pendukung meliputi:

a. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pelaksanaan pengawasan sebab tanpa dukungan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pelaksanaan pengawasan tidak akan berhasil.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang Pembangunan mengatakan bahwa:

“Partisipasi yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa sangat baik karena langsung berinteraksi kepada masyarakat mengenai pengaduan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(Wawancara SU,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bidang pembangunan mengatakan bahwa Partisipasi yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa sangat baik karena langsung berinteraksi kepada masyarakat mengenai pengaduan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa :

“Sebenarnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan dapat secara langsung berpartisipasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan, tetapi kurangnya interaksi kepada warga sehingga respon terhadap masyarakat kurang baik.”(Wawancara YU, 21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa Sebenarnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan dapat secara langsung berprtisipasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan, tetapi kurangnya interaksi kepada warga sehingga respon terhadap masyarakat kurang baik. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan maka masyarakat harus ikut berpartisipasi dimana dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan serta memberikan ide-ide atau gagasan, menyumbang tenaga, uang dan barang.

b. Transparansi

Transparansi merupakan pemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya dan dapat juga mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan mengatakan bahwa:

“ Anggaran dilakukan secara terbuka (tranparansi) sehingga semua kegiatan dapat diketahui. APBD ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan jadi APBD dikerjakan pada saat masuk tahun baru.(Wawancara SW,19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan mengatakan bahwa Anggaran dilakukan secara terbuka (tranparansi) sehingga semua kegiatan dapat diketahui. APBD ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan jadi APBD dikerjakan pada saat masuk tahun baru. Jadi anggaran secara terbuka dapat menunjang setiap pelaksanaan kegiatan dan memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan.

Hal senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Inspektorat mengatakan bahwa :

“Anggaran APBD ini di lakukan tentunya secara terbuka sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat melancarkan atau mempermudah kegiatan salah satunya adalah sarana dan prasarana yang sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.(Wawancara YU,21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa Anggaran APBD ini di lakukan tentunya secara terbuka sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat memperlancar atau mempermudah kegiatan salah satunya adalah sarana dan prasarana yang sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan dapat mendukung aktifitas pekerjaan di Kantor Inspektorat tersebut.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang dapat menghambat proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung. Dalam upaya pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Makassar terdapat beberapa faktor pendukung meliputi:

a. Aparatur Pemerintah

Sebagai aparatur pemerintah harus profesional sekaligus taat hukum memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang Pembangunan mengatakan bahwa:

“Menurut saya aparat pemerintah di Kantor Inspektorat sudah memiliki rasa tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang ditangani (Wawancara SU, 19 Juni 2017)

Dari hasil wawancara peneliti telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah dalam menangani setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan pekerjaan di bidang pengawasan. Berbeda halnya yang dikemukakan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya aparat pemerintah memang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tetapi pada kenyataannya aparat pemerintah perlu melaksanakan pemeriksaan secara ketat dan diteil karena masih banyak yang melakukan bidang-bidang penyimpangan dan penyelewengan yang tidak kita ketahui”.(Wawancara AI, 21 Juni 2017)

Dari hasil wawancara peneliti yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tetapi pada kenyataannya aparat pemerintah perlu melaksanakan pemeriksaan secara ketat dan diteil karena masih banyak yang melakukan bidang-bidang penyimpangan dan penyelewengan yang tidak kita ketahui. Sehingga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memberikan resah kepada seluruh masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Secara umum bahwa tingkat kinerja para karyawan baik karyawan swasta maupun karyawan aparat pemerintah dimana mereka bekerja secara kuantitatif maupun kualitatif di pengaruhi oleh bermacam-macam faktor.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan sekretaris Inspektorat mengatakan bahwa:

“Faktor yang datangnya dari dalam diri manusia dan luar diri manusia yaitu keadaan yang datangnya dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi kondisi dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan maupun yang menyenangkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan” (Wawancara DA, 19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara sadar bahwa pencapaian suatu kinerja yang maksimal tentunya ada faktor yang melatarbelakangi, mengapa ada aparat yang bekerja rendah/buruk dan ada yang bekerja baik. Pemahaman ini penting untuk mengantisipasi perkembangan sumber daya manusia aparatur di kantor inspektorat kota makassar sehingga dapat dengan mudah mengklasifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang keuangan dan kekayaan mengatakan bahwa:

“Apa bila sebuah kantor tidak di tunjang dengan sumber daya manusia yang baik maka sebaik apapun fasilitas yang di berikan oleh pimpinan tidak akan ada gunanya karena tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang baik” (Wawancara SW, 19 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala keuangan dan kekayaan bawa kantor inspektorat telah mahir mengoperasikan alat elektronik seperti laptop, penggunaan alamat web dan lain-lainnya. Atas dasar tersebut

peneliti dapat menyimpulkan sumber daya manusia yang dimiliki kantor inspektorat dapat di golongkan dalam katagori baik.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa:

Kami mengakui bahwasanya kesibukan adalah salah satu faktor kendala di dalam melakukan pengawasan dari tugas kami, dan tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) di kantor inspektorat yang masih kurang maksimal, sedangkan pekerjaan banyak yang menumpuk, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang maksimal”,(Wawancara AI,21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa fungsi pengawasan dimiliki inspektorat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal senada dengan salah satu anggota inspektorat mengatakan bahwa:

“Memang dalam pelaksanaan pengawasan, kami sering tidak maksimal karena disebabkan kesibukan kami dalam melaksanakan berbagai tugas yang lain. Sehingga waktu kami tidak banyak lagi untuk bersama-sama mengawasi hal tersebut”.(Wawancara IR,21 Juni 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan ternyata sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pihak Inspektorat kurang maksimal sehingga untuk pengawasan kurang efektif. Jika pihak Inspektorat beralasan bahwa terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya, itu sangat tidak rasional karena memang terbatasnya sumber daya manusia yang dimilikinya. Disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pihak inspektorat tidak punya manajemen yang bagus, jika manajemen bagus, maka semua terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang

akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Efektivitas merupakan hal yang penting dalam melaksanakan aktivitas. Agar aktivitas dapat diukur, maka tujuan dari kegiatan tersebut ditetapkan dengan jelas, karena tanpa adanya tujuan, kita tidak dapat menilai tercapai atau tidaknya efektifitas tersebut.

Eferktifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu instansi berhasil mencapai tujuan, maka instansi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas berkaitan erat dengan istilah efisiensi, efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berhasil mencapai apa yang telah menjadi tujuan. Efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara masukan dan keluar dalam berbagai kegiatan sampai dengan tujuan yang ditetapkan baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain dari pada pemeriksaan dan pengujian juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itulah

perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat di Kota Makassar adalah aparatur Pemerintahan yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap pengawasan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pemerintah (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kota Makassar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya partisipasi dan transparansi yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat kota makassar.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Inspektorat perlu memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu:

1. Dalam melaksanakan pengawasan fungsional dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu perlu dilakukan monitoring agar bisa berjalan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan.
2. Mengevaluasi dan memotivasi atas koreksi dan rekomendasi terhadap objek yang diperiksa sehingga tujuan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
3. Pengawasan fungsional dalam koordinasi pengawasan harus dilakukan agar kinerja dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Dalam laporan keuangan yang dilakukan seorang audit secara umum dan konsisten harus secara objektif dan transparansi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan.
5. Sumber daya manusia dalam kinerja pemerintah daerah harus di tingkatkan agar tujuan yang telah diterapkan dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Saran

Inspektorat memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga kinerja Inspektorat perlu di tingkatkan lagi dalam rangka terciptanya *good government* dan *clean governance*. Untuk itu diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasannya

DAFTAR PUSTAKA

- Fabanyo, Suryanti, 2010 .*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Ilmu Administrasi Negara
- Fajriansyah, Andi, 2016 . *Pengawasan Keuangan Daerah untuk Sektor Belanja pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar*. STIM LPI Makassar
- Gie, The Liang, 2007. *Administrasi Perkantoran Moderen.*, Yogyakarta : Radya Indra.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum Indonesia.
- Jusmawaty, 2014. *Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat di kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Ilmu pemerintahan.
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Maleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya. Jakarta: Mitra Wicana Media
- Mangkunegara, A.A Anwar Perabu 2009, *Evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : Penerbit Rafika Aditama.
- Manullang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh : penerbit Jakarta. : Ghalla Indonesia.
- Sarwoto, 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Rekruturisasi Dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju
- Siagian, P. Sondang, 2011. *Pengantar Manajemen*. edisi pertama. Cetakan pertama. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simamora, Henry.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : STIE YKPN.

Siswandi, dan Indra Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. edisi kedua. Jakarta : Mitra Wicana Media.

Sudjiwo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: cetakan keempat Alfabeta.

....., 2012 . *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen* , Jakarta : Handoko T.

Syakrani dan Syahriani, 2008. *Implementasi otonomi daerah dalam perspektif Good Governance*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010. *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketiga belas, Jakarta : Bumi Aksara.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 2011 . *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta : Rineka Cipta.

Perundang-undangan dan peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2005 tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar*.

Website

Roni, 2017. Inspektorat Ingatkan Hati-hati Kelola Anggaran, MetroTimur, Kota Makassar 10 Februari 2017 (<http://www.metrotimur.com>)

Saldy, 2017 Asisten 1 Pemkot Tersangka, ACC Sulawesi Langsung Soroti
Kinerja Inspektorat, Tribun Timur, Kota Makassar 04 April 2017
(<http://Makassar.tribunnews.com>)

Yokko, syamsuddin, 2015, Pengadaan Damkar Diduga Terindikasi
Korupsi, Upeks, Kota Makassar 14 Oktober 2016 (<http://upks.fajar.co.id>)